

**PENGARUH STATUS KEPEMILIKAN TERHADAP
TAX AVOIDANCE**
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
BEI Tahun 2013-2017)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**




Disusun Oleh:
Aprilia Anggraeni
NIM. 14.0102.0065

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

**PENGARUH STATUS KEPEMILIKAN TERHADAP
TAX AVOIDANCE
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
di BEI 2013-2017)**

Halaman Judul

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh:
Aprilia Anggraeni
14.0102.0065

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

PENGARUH STATUS KEPEMILIKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Aprilia Anggraeni

NPM 14.0102.0065

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 28 Agustus 2018

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Lilik Andriyani, S.E., M.Si.

Pembimbing I

Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si.

Pembimbing II

Tim Penguji

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si.

Ketua

Barkah Susanto, S.E., M.Sc.

Sekretaris

Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

15 SEP 2018

Drs. Marlina Kurnia, M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aprilia Anggraeni
NIM : 14.0102.0065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUH STATUS KEPEMILIKAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

**(Studi Empiris pada Perusahaan Keluarga Sektor Manufaktur yang
Terdaftar di BEI 2013-2017)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjananya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 28 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan



Aprilia Anggraeni
Aprilia Anggraeni

NIM. 14.0102.0065

RIWAYAT HIDUP

Nama : Aprilia Anggraeni
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 01 April 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Kauman, Gg. Krisnaya No 41-3 RT 03 RW 01
Cacaban, Magelang Tengah
Alamat Email : apriianggra01@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (2003-2008) : SD Negeri Cacaban 4 Magelang
SMP (2008-2011) : SMP Negeri 11 Magelang
SMK (2011-2014) : SMK Negeri 2 Magelang
Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang

Pengalaman Organisasi:

- Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Olahraga Universitas Muhammadiyah Magelang (2014-2015)
- Sekretaris Umum Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Olahraga Universitas Muhammadiyah Magelang (2015-2016)

Magelang, 28 Agustus 2018

Peneliti



Anggraeni Anggraeni

NIM. 14.0102.0065

MOTTO

**“Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai
dengan kesanggupannya”**

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

*“However difficult life may seem, there is always something you can DO
and SUCCEED at”*

-Stephen Hawking-

*“Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done
without hope and confidence”*

-Hellen Keller-

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“PENGARUH STATUS KEPEMILIKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2011-2017)”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh. Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE M.Sc, Ak selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Lilik Andriani, S.E., M.Si selaku Dosen Wali Studi serta Dosen Pembimbing I yang telah mendampingi, memberikan pengarahan selama masa kuliah, selalu memberikan pendidikan yang terbaik, selalu memberik dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan pendidikan yang terbaik, selalu memberik dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Orang tua penulis Bapak Satriya Budi dan Ibu Nur Aety, adik tersayang Encing, serta keluarga tercinta yang selalu memotivasi dan mendukung penulis untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
7. Sahabat-sahabat tercinta, Ari Trisnawati, Kurnia Ken Kirana, dan Mayasari yang selalu menemani, mendukung, mendengarkan, memotivasi dan membuat hari-hari perkuliahan menjadi lebih menyenangkan.
8. Sahabat-sahabat tercinta, Syifa Rani, Luluk Francistya, dan Fathi Amalia Ayudiena yang telah memberikan semangat dan motivasi sejak SMA.
9. Teman-teman Basecamp Auto Skripsi (Emak Ari, Ken, Maya, Arma, Hanjul, Angga, Harum, Soga, dan Sedy) yang telah memberikan nasihat, dukungan, dan motivasi setiap saat.
10. Sahabat-sahabat KKN Tegalwangi Desi, Mitil, dan Firnadhi yang telah memberikan dukungan serta doa.

11. Ulvie Ariesta, Windy Agustina yang memberikan pencerahan dan seluruh teman-teman akuntansi A angkatan 14 yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
12. Teman FDCrew, Ucik dan Peppy yang selalu memberikan semangat serta doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memotivasi dalam penuisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Riwayat Hidup.....	Error! Bookmark not defined.
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xii
Abstrak.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori.....	14
1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	14
2. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	15
3. Status Kepemilikan Asing.....	15
4. Status Kepemilikan Manajerial	16
5. Status Kepemilikan Instiusional	16
6. Status Kepemilikan Keluarga.....	17
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	18
C. Perumusan Hipotesis	20
D. Model Penelitian.....	27
BAB III METODA PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel	28
B. Data Penelitian	29
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	30
D. Metoda Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sampel Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
B. Statistik Deskriptif **Error! Bookmark not defined.**
C. Uji Asumsi Klasik..... **Error! Bookmark not defined.**
D. Analisis Regresi Linier Berganda..... **Error! Bookmark not defined.**
E. Hasil Pengujian Hipotesis **Error! Bookmark not defined.**
F. Pembahasan..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 40
B. Keterbatasan Penelitian 41
C. Saran..... 42

DAFTAR PUSTAKA 43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1	Kriteria Sampel	40
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	41
Tabel 4.3	Uji Normalitas sebelum <i>Outlier</i>	44
Tabel 4.4	Uji Normalitas Tahap 1	44
Tabel 4.5	Uji Normalitas Tahap 2	45
Tabel 4.6	Uji Normalitas Tahap 3	46
Tabel 4.7	Uji Normalitas Tahap 4	47
Tabel 4.8	Uji Normalitas Tahap 5	48
Tabel 4.9	Uji Multikolinearitas Tahap 1	49
Tabel 4.10	Uji Multikolinearitas Tahap 2	50
Tabel 4.11	Uji Multikolinearitas Tahap 3	51
Tabel 4.12	Uji Multikolinearitas Tahap 4	52
Tabel 4.13	Uji Multikolinearitas Tahap 5	53
Tabel 4.14	Uji Autokorelasi 1	54
Tabel 4.15	Uji Autokorelasi 2	55
Tabel 4.16	Uji Autokorelasi 3	56
Tabel 4.17	Uji Autokorelasi 4	57
Tabel 4.18	Uji Autokorelasi 5	58
Tabel 4.19	Uji Heterokedastisitas 1	59
Tabel 4.20	Uji Heterokedastisitas 2	60
Tabel 4.21	Uji Heterokedastisitas 3	61
Tabel 4.22	Uji Heterokedastisitas 4	62
Tabel 4.23	Uji Heterokedastisitas 5	63
Tabel 4.24	Uji Regresi Linier Berganda	65
Tabel 4.25	Uji Koefisien Determinasi	67
Tabel 4.26	Uji Statistik F	67
Tabel 4.27	Uji Statistik t	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Penelitian.....	27
Gambar 3.1	Uji Statistik F.....	38
Gambar 3.2	Uji Statistik t.....	39
Gambar 4.1	Uji Heteroskedastisitas	64
Gambar 4.2	Uji Statistik F.....	68
Gambar 4.3	Uji Statistik t (H_1)	69
Gambar 4.4	Uji Statistik t (H_2).....	70
Gambar 4.5	Uji Statistik t (H_3).....	71
Gambar 4.6	Uji Statistik t (H_4).....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Sampel Perusahaan	86
Lampiran 2	Data Variabel Penghindaran Pajak	87
	Data Variabel Kepemilikan Asing	90
	Data Variabel Kepemilikan Manajerial.....	93
	Data Variabel Kepemilikan Institusional.....	96
	Data Variabel Kepemilikan Keluarga	99
Lampiran 3	<i>Output SPSS</i>	
	Statistik Deskriptif.....	102
	Uji Normalitas sebelum <i>Outlier</i>	102
	Uji Normalitas Tahap 1	103
	Uji Normalitas Tahap 2	103
	Uji Normalitas Tahap 3	104
	Uji Normalitas Tahap 4	104
	Uji Normalitas Tahap 5	105
	Uji Multikolinearitas Tahap 1	105
	Uji Multikolinearitas Tahap 2	106
	Uji Multikolinearitas Tahap 3	106
	Uji Multikolinearitas Tahap 4	107
	Uji Multikolinearitas Tahap 5	107
	Uji Autokorelasi Tahap 1	108
	Uji Autokorelasi Tahap 2	108
	Uji Autokorelasi Tahap 3	109
	Uji Autokorelasi Tahap 4	109
	Uji Autokorelasi Tahap 5	110
	Uji Heterokedastisitas Tahap 1 (Uji Glejser)	110
	Uji Heterokedastisitas Tahap 2 (Uji Glejser)	111
	Uji Heterokedastisitas Tahap 3 (Uji Glejser)	111
	Uji Heterokedastisitas Tahap 4 (Uji Glejser)	112
	Uji Heterokedastisitas Tahap 5 (Uji Glejser)	112
	Uji Heterokedastisitas Tahap 5 (Grafik <i>Scatterplot</i>).....	113
	Uji Koefisien Determinasi.....	113
	Uji Statistik F	114
	Uji Statistik - t	114
Lampiran 4	Tabel F.....	115
	Tabel t.....	119

ABSTRAK

PENGARUH STATUS KEPEMILIKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2013-2017)

Oleh:

Aprilia Anggraeni

Salah satu penunjang perekonomian negara yaitu dari penerimaan pajak negara yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara paling besar. Perusahaan merupakan salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar dalam praktik pelaksanaan penerimaan pajak. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban sehingga terjadilah tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan guna meminimalkan jumlah pembayaran pajak dengan tidak melanggar hukum atau bersifat legal. Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2017. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 15 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah pengujian statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan tingkat signifikansi 5% . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kata Kunci: *Kepemilikan Asing, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, dan Tax Avoidance*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan Sumber Daya Alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang melebihi 262 juta jiwa (www.bps.go.id, 2 Mei 2018). Melimpahnya Sumber Daya Alam serta banyaknya jumlah penduduk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu penunjang perekonomian negara yaitu dari penerimaan pajak negara yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Meskipun penerimaan negara tidak sepenuhnya berasal dari pajak, namun pajak memiliki peran paling besar terhadap penerimaan negara itu sendiri. Maka dari itu, pemerintah mengupayakan agar pajak menjadi salah satu penerimaan negara paling besar. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan negara dalam APBN tahun 2018 tercatat Rp 1.878,4 triliun, dengan perolehan sebanyak Rp 1.877,3 triliun dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak hanya sebesar Rp 267,9 triliun (www.kemenkeu.go.id, 26 Mei 2018).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh kontrapestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan guna membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Undang-undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bab 1 pasal 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak diperoleh dari Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan (Perusahaan). Perusahaan merupakan salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar dalam praktik pelaksanaan penerimaan pajak (Suandy, 2011). Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban, karena mereka beranggapan pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi pendapatan atau laba yang diperoleh. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan di mana fiskus menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara yang mengakibatkan munculnya keinginan perusahaan untuk mengefisiensi beban pajak agar dapat memaksimalkan labanya dengan cara melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi ketentuan perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, sehingga manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai proses mengelola dan mengatur beban pajak yang harus dibayarkan (Lumbatouran, 1994). Manajemen pajak bukan hanya sekedar pengalihan kekayaan tanpa

biaya dari pemerintah ke pemegang saham, namun juga berpotensi mengakibatkan biaya agensi, biaya transaksi meningkat, penalti yang dinilai otoritas, dan peningkatan biaya politik dan / atau reputasi (Moore *et.al*, 2017). Mekanisme efisiensi melalui manajemen pajak dapat dilaksanakan apabila manajemen dalam pengelolaan dan pelaksanaan di perusahaan dapat diteapkan dengan baik. Namun, hingga saat ini masih ada beberapa perusahaan yang memajemen pajak perusahaan melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) agar jumlah pajak yang disetorkan oleh perusahaan kepada negara dapat berkurang. Jumlah besaran pajak yang perusahaan setorkan ke kas negara sesuai dengan besarnya laba perusahaan yang diperoleh selama satu periode.

Mardiasmo (2011) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai salah satu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Persoalan penghindaran pajak ini menjadi cukup rumit karena di lain sisi diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, namun di lain sisinya juga penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila dkk (2017) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai tindakan penhindaran atau peminimalan pajak yang masih tidak keluar dari ranah hukum yang berlaku. Penghindaran pajak juga terkadang menimbulkan bias yang mengakibatkan sebuah pemikiran apakah penghindaran pajak perlu dilakukan atau tidak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan dalam bentuk penghindaran pajak, memang dimungkinkan atau

dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktik-praktik yang berhubungan dengan penghindaran pajak lebih kepada pemanfaatan celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak dapat berbuat apa-apa dalam melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini sebenarnya merupakan suatu dilema bagi pemerintah, karena Wajib Pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan, namun dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Manajemen memegang peran penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan (Irawan dan Farahitma, 2012). Manajemen wajib memanfaatkan sumberdaya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*).

Teori keagenan (*agency theory*) memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Anthony dan Govindrarajan, 2005). Perusahaan yang melakukan pemisahan antara fungsi

pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada memaksimalkan manfaat (*utility*) pemilik (*principal*) dengan kendala (*constraint*) manfaat (*utility*) dan insentif yang akan diterima oleh manajemen (*agent*). Kepentingan yang berbeda sering menyebabkan konflik kepentingan antara pemegang saham/pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*) (Rifka dan Dini, 2016).

Perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor faktor tersebut antara lain: status kepemilikan asing, status kepemilikan manajerial, status kepemilikan institusional, dan status kepemilikan keluarga. Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri, atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia (Wiranata dan Yeterina, 2013). Semakin tinggi saham yang dimiliki investor asing di suatu perusahaan maka penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin rendah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Soga (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan jumlah kepemilikan asing tidak mampu mempengaruhi penghindaran pajak.

Oktaviana dan Wahidawati (2017) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang terdiri dari direksi dan komisaris. Semakin besar *insider ownership*, maka perbedaan kepentingan antara pemegang saham (pemilik) dengan pengelola perusahaan (manajemen) semakin kecil, mereka akan bertindak dengan lebih hati-hati karena manajer juga ikut menanggung konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari konsentrasi kepemilikan atau persentase saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan komisaris. Dewan direksi dan komisaris memiliki peran sebagai prinsipal sekaligus agen perusahaan, ketika baik direksi maupun komisaris memiliki saham di perusahaan di mana dia bekerja maka dalam pengambilan keputusan (misalnya dalam memajemen pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak) menjadi lebih berhati-hati, karena setiap keputusan yang manajer ambil akan berdampak tidak hanya pada perusahaan tetapi diri mereka sendiri. Semakin tinggi saham yang dimiliki manajer perusahaan maka penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin rendah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Fadhila (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*, di mana semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajerial, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dan begitupula sebaliknya.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan

investment banking (Veronica dan Siddharta, 2005). Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi terjadinya *agency conflict* dapat ditekan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meiza (2015) dan Merslythalia dan Lasmana (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, di mana semakin tinggi tingkat kepemilikan oleh institusi maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fenny (2015) dan Amelia dkk (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik penghindaran pajak dapat terhindarkan.

Aditama (2015) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya. Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moore *et.al* (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun tidak dengan penelitian yang dilakukan oleh

Aditama (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia merupakan salah satu indikasi adanya praktik penghindaran pajak. Data dari DJP Kemenkeu mencatat sebanyak 325.000 Wajib Pajak Badan telah menyampaikan SPT Tahunan 2017 per 18 April 2018. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, ada sebanyak 1,47 juta Wajib Pajak Badan yang seharusnya melaporkan SPT tahunannya. Sehingga dengan pencapaian ini, masih ada sekitar 1,1 juta Wajib Pajak Badan yang masih belum menyampaikan SPT Tahunan mereka (www.tribunews.com, 24 Mei 2018).

Indonesia masuk peringkat ke-11 terbesar terkait penghindaran pajak perusahaan dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, di mana pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia (www.tribunews.com, 25 Mei 2018). Selain itu Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan merupakan Wajib Pajak Badan (80%) dan sisanya (20%) merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (www.suara.com, 25 Mei 2018).

Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh William dan Lukas (2013) menyebutkan bahwa di Indonesia, dari 165.000 perusahaan terdata

sebanyak 159.000 dinyatakan sebagai perusahaan keluarga atau sebesar 96%. Berdasarkan data tersebut dapat diindikasikan bahwa perusahaan keluarga mempunyai andil yang cukup besar bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara, sehingga penerimaan pajak oleh negara semakin besar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Moore *et.al* (2017) yaitu: perbedaan pertama, menambahkan variabel kepemilikan asing sebagai variabel independen. Alasannya karena kepemilikan asing juga dianggap pihak yang fokus terhadap reputasi negara atau perusahaan pusatnya, ini juga yang menjadikan perusahaan multinasional (MNC) mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan, sehingga diharapkan dengan adanya kepemilikan asing dalam perusahaan publik dapat mengurangi tindakan *tax avoidance*. Perbedaan kedua, menambah variabel kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Alasannya yaitu biasanya perusahaan menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan perusahaan yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan.

Perbedaan ketiga, menambahkan variabel kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Alasannya karena pihak manajerial perusahaan juga memiliki saham dalam perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak manajerial maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan

penghindaran pajak dengan mengefisiensi beban pajak agar dapat memaksimalkan labanya akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan aktivitas perusahaan dapat diawasi melalui kepemilikan manajerial yang besar.

Perbedaan keempat, dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian di Indonesia khususnya pada perusahaan keluarga sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 sampai 2017. Alasannya karena perusahaan keluarga menghadapi konflik keagenan yang unik, seperti penguatan dan alturnisme asimetris diantara anggota keluarga yang mungkin memerlukan pendekan tata pemerintahan khusus (Corbetta dan Salvato, 2004). Selain itu perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara. perusahaan manufaktur sebagai suatu perusahaan yang telah menjadi wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak (Mulyani, 2014).

Price Waterhouse Cooper (PWC) mendefinisikan perusahaan bisnis keluarga sebagai perusahaan yang mayoritas hak suaranya berada di tangan pendiri atau orang yang mengakuisisi perusahaan (misal: orang tau, anak, atau ahli waris). Penelitian yang dilakukan oleh William dan Lukas (2013) menyebutkan bahwa di Indonesia, dari 165.000 perusahaan terdata sebanyak 159.000 dinyatakan sebagai perusahaan keluarga atau sebesar 96%. Berdasarkan data tersebut dapat diindikasikan bahwa perusahaan keluarga mempunyai andil yang cukup besar bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara, sehingga penerimaan pajak oleh negara semakin

besar, disebutkan setidaknya ada satu perwakilan keluarga yang terlibat di dalam manajemen atau administrasi perusahaan.

Perusahaan keluarga di Indonesia sangat mendominasi karena 96% perusahaan dimiliki oleh keluarga dengan omset sekitar US\$ 5-10 juta (PwC, 2015) dan total kekayaan mencapai US\$ 134 miliar (PwC, 2014), atau sekitar 25% dari produk domestik bruto Indonesia (www.ceostar.net, 20 Januari 2018). 87% keluarga merupakan pemilik sekaligus manajemen dari perusahaan dan hanya 13% yang berstatus sebagai pemilik tanpa masuk manajemen perusahaan. Mayoritas perusahaan keluarga menempatkan anggota keluarganya sebagai presiden/direktur (47%) atau direktur keuangan (23%), dan jabatan strategis lainnya (www.blj.co.id, 22 Januari 2018).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh status kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh status kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh status kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh status kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh status kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh status kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh status kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh status kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance*.

D. Kontribusi Penelitian

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan implementasi dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya faktor-faktor terkait terhadap kegiatan *tax avoidance* dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus untuk melakukan *tax avoidance*.
3. Bagi investor, memberikan masukan kepada investor dalam menilai dan mengevaluasi serta menjadi bahan pertimbangan dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun rincian sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal yang memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi penelitian ini untuk perumusan hipotesis, selain itu bab ini juga menggambarkan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, data penelitian yang terdiri dari jenis data dan sumber data serta teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, metoda analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang statistik deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai jawaban pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran penelitian bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul pada saat satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen, & Meckling, 1976). Sedangkan Anthony dan Govindarajan (2005) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Teori keagenan memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Menurut Eisenhardt, (1989) teori keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi, yaitu:

a. Asumsi tentang Sifat Manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), namun juga manusia tidak menyukai yang namanya risiko (*risk aversion*).

b. Asumsi tentang Informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang dapat diperjual belikan.

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

3. Status Kepemilikan Asing

Struktur kepemilikan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kepemilikan tersebar yang dikarakteristikan oleh perusahaan di negara-negara *common law* (Amerika dan Inggris) dan kepemilikan terkonsentrasi yang dikarakteristikan oleh perusahaan yang termasuk ke dalam negara-negara berkembang (Indonesia dan India). Soga dkk (2015) mendefinisikan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing.

Kepemilikan asing merupakan presentase jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh investor asing. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah

asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia (Nuraini, 2016).

4. Status Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) diartikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya direktur dan komisaris (Fernando, 2017). Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari konsentrasi kepemilikan atau persentase saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan manajemen. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dimana pemegang saham adalah dirinya sendiri dan membuat risiko perusahaan semakin kecil dimata kreditur (Asmawati dan Amanah, 2013).

5. Status Kepemilikan Instiusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Damayanti dan Susanto, 2015). Selain itu Faisal (2004: 199), mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Maka dari itu, semakin besar kepemilikan institusional maka pihak eksternal dalam mengendalikan perusahaan pun akan semakin kuat.

6. Status Kepemilikan Keluarga

Perusahaan didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang sahamnya. Keluarga merupakan semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat. Pengecualian pada perusahaan publik, negara, institusi keuangan (seperti: lembaga investasi, reksa dana, asuransi, dana pensiun, bank, koperasi) dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat) (Wahyu dan Setyawan, 2015). Karakteristik dari struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia masih di dominasi oleh keluarga, baik keluarga pendiri perusahaan maupun yang bukan pendirinya.

Pada perusahaan keluarga, seringkali ada anggota keluarga pemilik perusahaan yang turut serta atau berpartisipasi dalam manajemen perusahaan. Mereka merupakan perwakilan dari keluarga pemilik dalam manajemen perusahaan (Aprianto, 2015). Sehingga dapat diketahui bahwa

perusahaan keluarga cenderung memiliki kinerja yang lebih unggul daripada perusahaan keluarga karena anggota keluarga cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi pada perusahaan karena mereka cenderung ingin mempertahankan perusahaan agar dapat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Moore <i>et.al</i> (2017)	<i>Dual Entrenchment and Tax Management: Classified Boards and Family Firms Status</i>	Struktur dewan pengurus dan status perusahaan keluarga berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.
2.	Fadhila dkk (2017)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i>
3.	Amelia dkk (2017)	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak	kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
4.	Hidayat (2017)	Pengaruh Pengungkapan CSR dan Struktur Kepemilikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak.	CSR dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.
5.	Nuraini (2016)	Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional dan Asing terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Pemoderasi	Kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan saham asing tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan CSR memperlemah pengaruh kepemilikan saham institusional dan saham asing terhadap nilai perusahaan.

Sumber: berbagai jurnal dari penelitian terdahulu, 2018

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Peneliti	Judul	Hasil
6.	Pramudito dan Maria (2015)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Konservatisme akuntansi dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Meiza (2015)	Pengaruh Karakteristik GCG dan <i>Deferred Tax Expense</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Defereed tax expense</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Aditama (2015)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak	Profitabilitas, kepemilikan keluarga, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
9.	Soga dkk (2015)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak.	Struktur kepemilikan asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
10.	Wiranata dan Yeterina (2013)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia.	Kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Sumber: berbagai jurnal dari penelitian terdahulu, 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Status Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*

Teori agensi membahas mengenai hubungan keagenan antara prinsipal dengan agen. Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa terdapat konflik yang terjadi antara prinsipal dan agen yang dilatar belakangi oleh perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara pemilik saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Manajer selaku *agent* ditunjuk oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan. Guna mencapai tujuan pemegang saham, maka manajer berupaya memperoleh laba sebesar-besarnya.

Laba yang besar diperoleh perusahaan dengan salah satu cara yaitu dengan melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan asing memiliki peran yang sangat kuat di dalam perusahaan. Investor asing mendorong manajemen perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan laporan keuangan perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki oleh pihak asing, maka semakin besar pula suara investor untuk ikut andil dalam penentuan kebijakan perusahaan.

Suatu perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial). Pembedanya yaitu jumlah proporsi saham yang dimiliki investor yang kemudian dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan perusahaan. Kepemilikan asing pada

dasarnya merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh investor asing. Investor asing melakukan penanaman modal mereka di perusahaan yang berada di wilayah Republik Indonesia (Nuraini, 2016).

Penelitian oleh Soga (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Pihak manajer berusaha untuk melaporkan laba demi untuk memaksimalkan pengelolaan perusahaan dengan jalan membuat laba perusahaan makin kecil ataupun makin besar, tergantung dari tujuan manajer selaku pengelola perusahaan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Status kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Status Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi merupakan kontrak antara satu atau beberapa orang prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya masalah yang biasa disebut *agency problem*, maka dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Pihak

manajer memiliki semangat yang kuat untuk dapat memberi kemakmuran pada dirinya yang seorang pemilik sekaligus bagian dalam manajemen perusahaan.

Menurut penelitian Fernando (2017) kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Peningkatan kepemilikan saham oleh manajerial membantu dalam mengurangi tindakan kecurangan perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak yang berupaya untuk memaksimalkan laba perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan kepemilikan manajerial yang besar maka aktivitas perusahaan dapat diawasi.

Hasil penelitian Pramudito dan Maria (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fadhila dkk (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*, di mana semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajerial, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dan begitupula sebaliknya.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Status kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Status Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Elemen dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan berbeda (Jensen dan Meckling, 1976). Struktur kepemilikan dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan di mana hal ini disebabkan karena adanya kontrol yang mereka miliki, salah satunya yaitu kepemilikan institusional.

Berdasarkan teori agensi kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi *agency conflict* yang terjadi antara manajer dan pemegang saham, dengan melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan. Selain itu pemilik institusional juga memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar pula pengawasan oleh investor sehingga tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajer yang akan merugikan pemilik perusahaan dapat dihindarkan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) dalam penelitian Amelia dkk (2017) mendefinisikan kepemilikan institusional

sebagai kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, intitusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Brous dan Kini (1994) menyatakan bahwa ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Meiza (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Merslythalia dan Lasmana (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, baik besar atau kecil persentase kepemilikan saham dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Status kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Status Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan yang berguna untuk melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Hal tersebut dapat berupa kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan pemegang saham.

Semakin besar total asset perusahaan, maka pajak yang ditanggung pun semakin besar. Manajemen perusahaan biasanya cenderung memanipulasi total asset perusahaan tanpa sepengetahuan pemegang saham agar jumlah pajak yang dibayarkan sedikit.

Salah satu alasan mendasar mengapa keluarga dapat beroperasi dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga dan membuat keputusan secara berbeda terkait dengan kesamaan antara perusahaan keluarga dan sistem tata kelola "orang dalam" Franco-Jerman versus sistem tata kelola AngloAmerican "orang luar", terutama yang berkaitan dengan ketidakmampuan pasar karena blok pengendali yang dimiliki oleh pemilik keluarga (Moore *et al.*, 2017).

Mekanisme tata kelola agensi tradisional seperti skema kompensasi insentif, karakteristik dewan pengurus, dan instrumen pemantauan eksternal memenuhi tujuan yang diharapkan (Reeb D.M &, 2003; Sharma A & Braun, 2007; (Chrisman et al, 2007), Crama *et.al* (2003) dalam Moore *et al* (2017) mengemukakan bahwa perusahaan keluarga menghadapi konflik keagenan yang unik, seperti penguatan dan altruisme asimetris di antara anggota keluarga, yang mungkin memerlukan pendekatan tata pemerintahan khusus Corbetta & Salvato (2004) dalam Moore *et.al* (2017). Namun, teori keagenan juga mendukung argumen bahwa perusahaan keluarga berperforma buruk atau mengganggu kualitas laba relatif terhadap perusahaan non-keluarga (misalnya Dharwadkar, George, & Brandes, 2000; Jensen, 1994), yang menunjukkan bahwa

mengendalikan manajer keluarga dapat memperkuat kelemahan mereka. Pemegang saham minoritas (Morck, Wolfenzon, & Yeung, 2005; Peng & Jiang, 2010).

Sejauh masalah agensi tersebut berpotensi untuk meningkatkan biaya modal, hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku perusahaan keluarga (Burkart, Panunzi, & Shleifer, 2003; Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 2002; McConaughy, 1999). Hasil temuan Chen et.al (2010) menyiratkan bahwa perusahaan keluarga secara signifikan membebani biaya marjinal dan manfaat yang terkait dengan pengelolaan pajak relatif terhadap perusahaan non-keluarga dan mencerminkan konflik agensi yang cukup besar antara pemegang saham minoritas keluarga dan eksternal. Artinya, pemilik keluarga memiliki posisi ekuitas yang besar dan kurang beragam dibandingkan pemegang saham minoritas, dengan eksposur yang lebih besar terhadap potongan harga yang berkaitan dengan persepsi pemegang saham eksternal tentang kepemilikan keluarga pemilik.

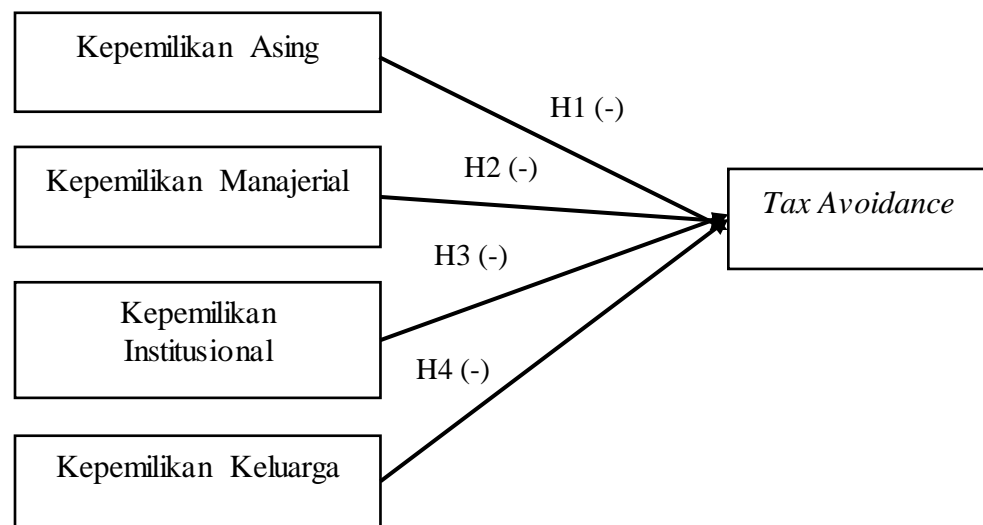
Penelitian yang dilakukan oleh Moore *et.al* (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Chen *et.al* (2010) yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan keluarga lebih agresif dalam tindakan pajaknya daripada perusahaan non-keluarga, menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam S&P 1500 Index (periode 1996-2000), perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non-

keluarga. Hal ini diduga terjadi karena dibandingkan perusahaan non-keluarga, *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Status kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa populasi terkait dengan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek dengan kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013 sampai 2017.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Arikunto (2006) mendefinisikan metode *purposive sampling* sebagai teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Sedangkan menurut (Notoatmodjo, 2010) metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya.

Adapun kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2017.
2. Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan tahunan dalam kurun waktu lima tahun dari 2013 hingga 2017.

3. Perusahaan telah menerbitkan laporan tahunan dalam kurun waktu lima tahun dari 2013 hingga 2017.
4. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang Rupiah.
5. Laporan tahunan perusahaan memiliki kelengkapan data (informasi) yang dibutuhkan dalam pengukuran masing-masing variabel.

B. Data Penelitian

1. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (pihak lain) dan data tersebut diperoleh melalui lembaga atau keterangan serta melalui studi pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi dan dianakusus (Sugiyono, 2013). Jenis data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2017. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.ac.id.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, kriteria, biografi,

peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi (Sugiyono, 2013).

Data diperoleh dengan cara menyalin terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang nantinya akan diambil elemen-elemen tertentu yang akan digunakan dalam pengukuran variabel. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari *Indonesian Stock Exchange (IDX)* yang berupa data kuantitatif (laporan tahunan perusahaan) yang nantinya akan diambil elemen-elemen tertentu yang akan digunakan dalam pengukuran variabel.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah tindakan penghindaran atau peminimalan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang mana masih tidak keluar dari ranah hukum yang berlaku. Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan

cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Amelia dkk, 2017). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini sendiri menggunakan CETR. Rumus CETR yaitu (Amelia dkk, 2017):

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Variabel Independen

a. Status Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan presentase jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh investor asing. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia (Nuraini, 2016).

Kepemilikan asing dapat dirumuskan sebagai berikut (Nuraini, 2016) :

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{jumlah saham asing}}{\text{total saham yang beredar}} \times 100\%$$

b. Status Kepemilikan Manajerial

Amelia dkk (2017) Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan. Pengukuran dilihat dari besarnya

proporsi saham yang dimiliki manajemen pada akhir tahun yang disajikan dalam bentuk presentase.

Kepemilikan manajerial dapat diumuskan sebagai berikut (Amelia dkk, 2017):

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{jumlah saham manajerial}}{\text{total saham yang beredar}} \times 100\%$$

c. Status Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi keuangan seperti: perusahaan asuransi, investor luar negeri, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Veronica dan Siddharta, 2005). Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.

Kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut (Amelia dkk, 2017):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{total saham yang beredar}} \times 100\%$$

d. Status Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga merupakan saham dimana dimiliki oleh anggota keluarga yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jumlah ssaham keluarga didapat dari jumlah besarnya kepemilikan saham oleh pengendali, mayoritas, pihak berelasi dan anggota keluarga yang

memiliki saham di perusahaan tersebut baik yang memiliki jabatan maupun tidak (Aditama, 2015).

Kepemilikan keluarga dapat di rumuskan sebagai berikut (Aditama, 2015):

$$\text{Kepemilikan Keluarga} = \frac{\text{jumlah saham keluarga}}{\text{total saham yang beredar}} \times 100\%$$

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang mendeskriptifkan suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, *Variance*, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2016:48). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai prasyarat regresi linier yang berfungsi untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya bersifat efisien (Ghozali, 2016). Uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau

variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154).

Pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Adapun alat uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih mendetail terkait normalitas data-data yang digunakan. Data dikatakan normal apabila hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov $> 0,05$ atau 5%.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu kondisi di mana terdapat kolerasi antar variabel bebas atau dengan kata lain adalah hubungan linear yang sempurna dan pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari suatu model regresi. Uji multikolinealitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas/independen (Ghozali, 2016:103). Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Data dikatakan bebas multikolinieritas apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 .

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pada

penelitian apabila terjadi korelasi, maka dinamakan ada autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lainnya (Ghozali, 2016:107).

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan periode $t-1$. Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *run-test*. Apabila nilai signifikan hasil pengujian $> 0,50$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari auto korelasi (Ghozali, 2016:116).

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan uji yang menilai apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134).

Salah satu alat uji yang digunakan untuk menguji data yang ada apakah terjadi heterokedastisitas atau tidak dapat digunakan menggunakan Uji Glejser. Glejser mengusulkan untuk meregres nilai *absolut* residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2016:137). Apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas dan begitu pula sebaliknya.

Alternatif lain yaitu heteroskedastisitas juga dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yakni ZPRED dengan residualnya SRESID. Data dikatakan heterokadastisitas apabila titik-titiknya membentuk suatu pola. Data dikatakan bebas heteroskedastisitas atau data homokedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2016).

3. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda yaitu hubungan secara linier antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen. Teknik analisis tersebut sesuai untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keterkaitan antara beberapa variabel. Penelitian ini menggunakan regresi berganda karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu variabel. Selain itu mengetahui apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$TaxAvoid = \alpha + \beta_1 KA + \beta_2 KM + \beta_3 KI + \beta_4 KK + e$$

Keterangan =

TaxAvoid = Penghindaran Pajak

KA = Kepemilikan Asing

KM = Kepemilikan Manajerial

KI = Kepemilikan Institusional

KK = Kepemilikan Keluarga

e = error

4. Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

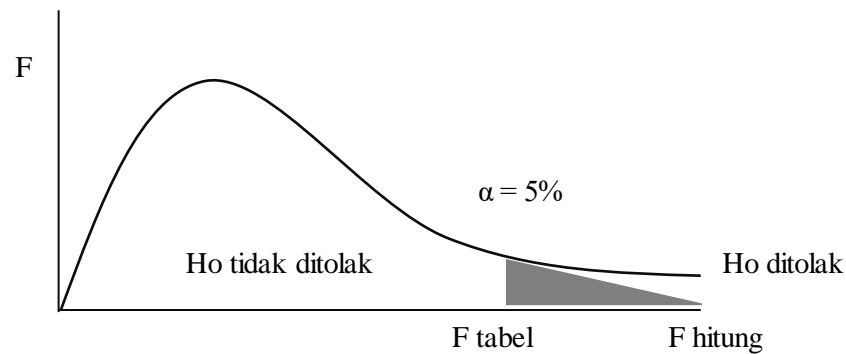
Pengujian koefisien determinasi akan mengukur terkait dengan kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol hingga satu. Menurut Ghozali (2016:98), nilai koefisien korelasi yang mendekati 1 berarti bahwa variabel independen telah memberikan (hampir) semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Adjusted R Square*.

b. Uji Statistik F (*Goodness of Fit*)

Uji statistik F menurut (Ghozali, 2016) bertujuan untuk menunjukkan apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau menguji kelayakan model (*goodness of fit*). Pengujian F tabel dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5%, dan pengujian dilakukan dengan kriteria:

- 1) Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $p\text{-value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti model yang digunakan bagus (*fit*).

2) Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $p\text{-value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima, yang berarti model yang digunakan tidaklah bagus (*no fit*).



Gambar 3.1
Uji Statistik F

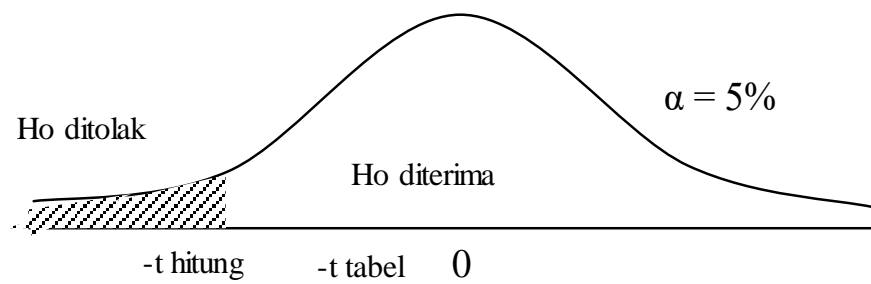
c. Uji Statistik t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016:97). Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Pengujian dilakukan dengan kriteria:

a) Hipotesis Negatif

1) Apabila $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, atau $p\text{-value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

- 2) Apabila $-t \text{ hitung} > -t \text{ tabel}$, atau $p\text{-value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, maka secara statistik data yang ada tidak mampu membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Uji Statistik t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa baik variabel kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, hal ini dikarenakan investor asing hanya berfokus pada besar kecilnya harga saham sehingga ada tidaknya investor asing tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini dikarenakan mereka akan bertindak dengan lebih hati-hati karena manajer juga ikut menanggung konsekuensi dari tindakan yang dilakukan sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melakukan *tax avoidance* bagi perusahaan. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, di mana

pihak institusi selain hanya berfokus terhadap besaran saham yang mereka miliki namun juga beberapa diantara mereka masih merupakan anggota keluarganya sendiri. Kepemilikan keluarga juga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, di mana mereka cenderung tidak melakukan penghindaran pajak demi menjaga nama baik citra perusahaan dan menjaga nama baik anggota keluarganya.

Perusahaan keluarga lebih cenderung tidak melakukan penghindaran pajak atas laba yang diperoleh. Hal ini dikarenakan mereka ingin menjaga *image* perusahaan dimata para investornya. Selain itu, kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh anggota keluarga itu sendiri sehingga mereka cenderung tidak ingin merugikan baik diri sendiri maupun anggota keluarganya. Perusahaan keluarga mendorong perusahaan-perusahaan untuk berlaku jujur dan lebih transparan terkait laporan keuangan perusahaan kepada publik.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 14.6% faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang juga dapat mempengaruhi *tax avoidance*.
2. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan sektor manufaktur dalam kurun waktu lima tahun.
3. Penelitian ini masih menggunakan Grafik *Scatterplot* dalam pengujian heterokedastisitasnya.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lain seperti profitabilitas sebagai variabel independen, karena semakin *profitable* suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat memposisikan diri dalam *tax planning* sehingga mampu memperoleh pajak yang optimal.
2. Menambahkan variabel manajemen laba, karena apabila terjadi kenaikan pada manajemen laba maka penghindaran pajak oleh perusahaan juga akan semakin naik.
3. Penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan atau mengganti sektor lain misalnya sektor keuangan.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan uji heterokedastisitas yang lain selain Grafik *Scatterplot*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Ahmad. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Amelia, M. V., dan Pratomo Dudi, K. 2017. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak, 4(2), 1510-1515.
- Anthony N. R., dan Vijay Govindarajan. 2005. *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aprianto, R. 2015. Proporsisi Hukum Antara Surat Edaran BI Nomor 13/28/DPNP perihal Penerapan Strategi ANti Fraud Bagi BU dengan Peraturan BI Nomor 11/25/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko. *Privat Law*, 7(1), 7–27.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- B. W. Pramudito dan Maria M. R. S. 2015. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*. *E-Journal Akuntansi*. Vol. 13.3 (705-722).
- Chen, K. P, dan Chu, C. Y. C. 2010. Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion. *Rand Journal of Economics*.
- Crama, Y., Leruth, L., Renneboog, L., & Urbain, J. P. 2003. Corporate control concentration measurement and firm performance. In J. Batten, & T. Fetherston (Vol. Eds.), *Series research in International Business and Finance*. Vol. 17. Social responsibility: Corporate Governance Issues (pp. 123-149). Oxford: JAI Press (Elsevier Science Ltd).
- Dr. Sylvia V. N. P. S., dan Dr. Siddharta U. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba. *SNA VIII*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Eisenhardt, K. 1989. *Agency Theory: An Assesment and Review*. *Academy of Management Review*, 14.
- F. Damayanti dan T. Susanto. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets

Terhadap Tax Avoidance, 5(2), 187–206.

Hidayat, Taufik. 2017. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Struktur Kepemilikan. *Publikasi Ilmiah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Idzni I. N., dan Agus P. 2017. Pengaruh Ketertarikan Investor Asing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 6 No. 1 (2337-3806).

Irawan H. P., dan A. Farahmita. 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan.” Simposium Nasional Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.

Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. 3: 305-360.

Fernando, Ade. 2017. Pengaruh Struktur Kepemilikan Managerial, Institusional, dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur Sektor Kimia yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JOM FISIP*, 4 No. 2 (130113855).

Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Lumbatouran, S. 1994. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

N. S. Fadhila, Dudi P., dan Siska P. Y. 2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Noriska. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 21.3, 1803–1820.

Mahulae, E. E., Dudi, P., dan Annisa, N. 2016. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *e-Proceeding of Accounting*. Vol. 3, No. 2, 1626.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.

Meiza, R. 2015. Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance. *Artikel Ilmiah Akuntansi*. Universitas Negeri Padang.

Merslythalia, D. R., dan Lasmana, M. S. 2016. Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 11(2), 116–123.

- Moore, J. A., Suh, S., & Werner, E. M. 2017. Dual entrenchment and tax management : Classified boards and family, 79(June), 161–172.
- Ngadiman dan C. Puspitasari. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol. XVIII No. 03, 408-421.
- Notoatmodjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nuraini, Sevi. 2016. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional dan Asing terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi. *Artikel Ilmiah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Oktaviana L.L, dan Wahidahwati. 2017. Pengaruh Kepemilikan Saham dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. Vol. 4(16), 1-20.
- Soga, Noholo, P. 2015. Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo, 1–12.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Lukas W. A., dan Ronny H. M. 2013. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga : Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan, 1(1).
- Wahyu, T. U., dan H. Setyawan. 2015. Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tindakan Pajak Agresif Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. *Public Choice*, 2 No. 1(2320-9791), 363–380.
- Wiranata, Y. A., & Nugrahanti, Y. W. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia, 15(1), 15–26.
- www.bps.go.id. *Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2017*. (Diakses pada 2 Mei 2018).
- www.kemenkeu.go.id. *Penerimaan Negara dalam APBN*. (Online, diakses pada 26 Mei 2018).
- www.tribunews.com. *Penyampaian SPT Tahunan*. (Diakses pada 24 Mei 2018).
- www.tribunews.com. *Indonesia masuk peringkat 11 penghindaran pajak*. (Diakses pada 25 Mei 2018).

www.suara.com. *Penghindaran pajak di Indonesia menjadi masalah serius.* (Diakses pada 25 Mei 2018).

www.ceostar.net. *Perusahaan keluarga di Indonesia sangat mendominasi.* (Diakses pada 20 Januari 2018).

www.blj.co.id. *Posisi anggota keluarga di perusahaan keluarga.* (Diakses pada 22 Januari 2018).